

BAB III

RESOLUSI PBB 1973 (Pemberlakuan Zona Larangan Terbang)

Mulai pertengahan Februari, protes marak di berbagai kota di Libya, menuntut pemimpin Libya Moammar Khadafi yang telah berkuasa selama 42 tahun. Kubu oposisi membentuk pemerintahan tandingan di Benghazi, Libya timur. Sejak itu, kubu oposisi dan pasukan pro-Kaddafi bertempur memperebutkan berbagai kota kunci di negara ini. Sementara itu, Liga Arab dan beberapa negara Uni Eropa mendukung pemberlakuan zona larangan terbang untuk menghentikan laju pasukan Kaddafi.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi terhadap Libya. Resolusi terbaru ini menyerukan diambilnya semua langkah yang diperlukan terhadap pasukan yang setia pada pemimpin Libya Muammar Khadafi. Dalam sidang voting Dewan Keamanan PBB di New York, 10 negara anggota menyetujui resolusi tersebut. Sementara 5 negara menyatakan abstain. Resolusi ini membolehkan negara-negara asing untuk memberlakukan zona larangan terbang diatas wilayah Libya. Dengan adanya larangan terbang ini, otomatis tidak ada satu pesawat pun kecuali pesawat

untuk misi kemanusiaan dan pesawat yang diberi izin PBB dan Liga Arab yang diperkenankan keluar atau masuk dari sejumlah bandara di Libya.¹

Jelas resolusi tersebut membuat posisi Khadafi semakin terpojok. Dalam konteks nasional Libya, Khadafi masih senantiasa mendapatkan perlawanan sengit dari pemberontak, terutama di wilayah timur. Adapun Liga Arab yang menjadi naungan semua negara Arab termasuk Libya tidak memihak Libya, terutama setelah negara-negara Arab teluk mendukung PBB menetapkan zona larangan terbang di atas Libya yang kemudian dimanfaatkan negara-negara sekutu untuk menyerang negara itu seperti yang terjadi dalam kenyataannya.

Tindakan militer PBB ini tidak membuat Khadafi terlihat takut. Bahkan dia menyatakan kalau aksi militer ini adalah aksi ilegal karena pihaknya hanya ingin memadamkan pemberontakan. PBB sudah melanggar prinsipnya sendiri untuk tidak ikut campur dalam masalah domestik suatu negara. Khadafi juga mengingatkan negara-negara pelanggar kedaulatan Libya itu bahwa perang akan berlangsung lama. Pernyataan ini harus ditanggapi dengan serius karena keluar dari seorang pemimpin yang pernah menjadi simbol militansi dunia ketiga. Perang kecil bisa menjadi perang besar atau perang sesungguhnya.

¹ www.detiknews.com/jumat,18/03/2011

A. Isi dan Tujuan Resolusi PBB 1973

Berbeda dengan di Mesir yang tentaranya masih bias bersatu, di Libya tentara mengalami perpecahan. Sebagaimana diketahui, perpecahan tentara Libya tersebut kini berakibat lanjut pada perang saudara. Bermula sejak Khadafi berpidato di televisi yang menyatakan dirinya bersikukuh untuk mempertahankan kedudukannya. Para penentang Khadafi kemudian melancarkan perlawanan bersenjata. Mereka segera menguasai daerah-daerah penghasil minyak di Libya.

Oleh karena itu, untuk mengatasi krisis politik di Libya, pada 17 Maret 2011, Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi kepada Libya. Isi resolusi yang terdiri dari 10 point tersebut antara lain :

1. Menuntut berakhirnya dengan segera gencatan senjata dan kekerasan serta semua serangan dan pelanggaran kepada penduduk sipil.
2. Menuntut pemerintah Libya mengambil semua langkah untuk melindungi rakyat sipil dan memenuhi kebutuhan dasar mereka, dan memastikan bantuan kemanusiaan dilakukan dengan segera dan tanpa halangan.
3. Meminta negara-negara anggota PBB untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi penduduk sipil dan mereka yang tinggal di wilayah yang terancam yakni yang berada di wilayah Arab Libya

Jamahiriya, termasuk Benghazi. Namun tidak termasuk pejabat asing yang menjadi bagian dari pemerintah Libya.

4. Memutuskan untuk memberlakukan larangan penerbangan di wilayah udara Arab Libya Jamahiriya untuk melindungi penduduk sipil. Namun pesawat kemanusiaan dan pesawat PBB, serta Liga Arab dikecualikan.
5. Memperkuat embargo senjata yang dijatuhkan pada 26 Februari, dengan meminta negara-negara PBB untuk menginspeksi wilayah mereka. Termasuk bandara udara, pelabuhan laut, dan udara di atas laut, kapal, dan pesawat yang terbang menuju atau dari Libya jika mereka memiliki informasi kuat bahwa muatan mengandung barang militer yang dilarang atau tentara bayaran yang sedang dikirim.
6. Memerintahkan semua negara untuk menghalangi pesawat yang dimiliki Libya, dioperasikan, atau memiliki izin dari Libya. Atau pesawat jenis apapun yang dipercaya membawa senjata terlarang atau tentara bayaran yang sedang diangkut, maupun berada di darat atau sedang melintasi wilayah mereka tanpa izin dari Komite pengawas sanksi PBB.
7. Memberikan larangan perjalanan kepada duta Libya yang terlibat perekrutan tentara bayaran untuk rezim Muammar Kadhafi.
8. Memperpanjang masa pembekuan aset tujuh atau lebih anggota keluarga Kadhafi termasuk tiga putra Kadhafi yang merupakan

menteri pertahanan, direktur intelijen militer, dan direktur keamanan organisasi eksternal, dan sekretaris kelengkapan.

9. Membekukan lima aset institusi keuangan vital yakni: Bank Central, Otoritas Investasi Libya, Bank Asing Libya, Portfolio Investasi Libya Afrika, dan Perusahaan Minyak Nasional Libya.
10. Meminta Sekjen PBB Ban Ki-moon untuk membentuk panel ahli delapan-anggota untuk membantu komite pengawasan sanksi PBB mengawasi pelaksanaan sanksi terhadap Libya.²

Tujuan di sahkannya Resolusi PBB 1973 ini yaitu untuk melindungi keselamatan rakyat sipil dan meredakan konflik. Dengan memberikan sanksi terhadap pemerintah Libya berupa embargo dan pemberlakuan zona larangan terbang. Tidak hanya di Libya saja, zona larangan terbang yang di berlakukan di Palestina, Suriah dan negara lainnya mempunyai tujuan yang sama.³

Zona larangan terbang atau zona yang dilarang untuk melakukan penerbangan adalah sebuah wilayah di mana pesawat tidak diizinkan untuk terbang. Istilah ini biasanya terdapat dalam konteks militer, bisa dikatakan sebagai zona demiliterisasi di udara, dalam zona ini melarang pesawat militer sebuah bangsa yang sedang berperang untuk melakukan penerbangan di zona yang ditetapkan sebagai zona larangan terbang. Dengan adanya resolusi tersebut secara langsung PBB telah

² http://www.today.co.id/read/2011/03/20/18317/alasan_perancisinggrisas_segera_meny Serang_libya

³ <http://politik.kompasiana.com/2011/03/22/apa-maksud-resolusi-dk-pbb-1973> diunduh pada tanggal 2 februari 2012

memberikan mandat kepada negara anggota untuk memberlakukan sanksi dan embargo kepada Libya. Termasuk pasukan koalisi dan beberapa negara Eropa serta beberapa negara Arab mulai bertindak berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 yang memberi wewenang untuk melakukan segala cara yang diperlukan demi melindungi warga sipil Libya.

B. Peran Amerika, Inggris, Perancis, dan NATO dalam Pelaksanaan Zona Larangan Terbang (Resolusi PBB 1973)

Pada 1 Maret 2011 dunia internasional mulai tak tahan dengan sikap pemimpin Libya Moammar Khadafi, negara-negara barat pun melakukan tindakan dengan menyiapkan pasukan militer untuk turun ke Libya. Pada saat itu juga pemerintah Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat telah mengirimkan ratusan penasihat militer ke Libya untuk mendirikan pangkalan-pangkalan militer di Libya Timur yang sudah dikuasai oleh penduduk anti Khadafi. Pasukan militer ketiga negara tersebut juga membangun pangkalan-pangkalan militer di dua kota di Libya timur yaitu kota Benghazi dan Tobruk yang pada saat itu berada di bawah kendali kelompok oposisi.

Perdana Menteri Inggris mengutarakan bahwa tidak menutup kemungkinan bila negaranya bersedia bergabung dengan sekutu untuk membentuk zona larangan terbang di langit Libya. Zona larangan terbang itu perlu diterapkan agar militer

loyalis Khadafi tidak lagi menembaki massa pemberontak dengan pesawat udara atau helikopter. Dan upaya tersebut juga akan didukung kekuatan militer NATO (organisasi pertahanan yang dibentuk AS dan Inggris).⁴

Pembentukan resolusi yang mencantumkan zona larangan terbang didalamnya telah disiapkan oleh negara sekutu, pada tanggal 8 Maret 2011 Inggris dan Prancis sedang menyusun sebuah resolusi PBB mengenai zona larangan terbang Libya yang akan diajukan ke Dewan Keamanan PBB. Dewan Keamanan PBB dengan suara tegas dan yakin menyetujui sanksi-sanksi terhadap pemerintah Khadafi dan memerintahkan penyelidikan atas kejahatan kemanusiaan pada 26 Februari. Langkah-langkah baru yang mengarah ke tindakan militer mungkin menghadapi penentangan dari China, Rusia dan sejumlah anggota lain Dewan Keamanan.⁵

Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan rancangan resolusi zona larangan terbang untuk melindungi rakyat sipil Libya dari serangan militer. Dewan Keamanan PBB mempertimbangkan rancangan resolusi tentang zona larangan terbang di atas Libya.

Zona larangan terbang itu akan membatasi ruang gerak jet-jet militer Libya dan mencegah mereka menyerang penduduk sipil dan pemberontak. Liga Arab mendukung tindakan semacam itu dan duta besar Perancis untuk PBB telah menyampaikan rasa kecewa terhadap kurangnya dukungan Dewan Keamanan. Duta

⁴Apriadi Tamburaka, Revolusi Timur Tengah, Narasi, Yogyakarta 2011, hal.253-255

⁵<http://internasional.kompas.com/read/2011/03/08/02075966/Zona.Larangan.Terbang.Libya.Dirancang>

besar Gerard Araud di New York mengatakan ia sangat tertekan dengan makin memburuknya situasi di Libya dan Dewan Keamanan belum juga bereaksi. Lebanon mengusulkan resolusi larangan terbang itu atas nama Liga Arab.

Perancis dan Inggris adalah pendukung utama zona larangan terbang dalam Dewan Keamanan. Tiongkok dan Russia, dua anggota tetap Dewan yang mempunyai hak veto menentang tindakan semacam itu. Pertemuan menteri luar negeri G8 di Paris hari Selasa mendesak Dewan Keamanan untuk mengambil tekanan keuangan tambahan terhadap pemimpin Libya, Moammar Kadhafi untuk memaksanya mundur, namun kelompok itu gagal menyepakati zona larangan terbang.⁶

Desakan-desakan pun semakin terdengar luas, selain Amerika dan negara-negara sekutunya organisasi internasional seperti OKI (organisasi konferensi Islam) dan Liga Arab turut serta menyeruakan diberlakukannya zona larangan terbang kepada PBB. Desakan tersebut menguat karena jet-jet tempur tentara Kadhafi terus melancarkan serangan udara ke wilayah-wilayah yang dikuasai oposisi. Ironisnya, serangan itu justru lebih banyak merenggut nyawa penduduk atau warga sipil. Organisasi Konferensi Islam (OKI) terus menekan PBB agar segera menerapkan zona larangan terbang di wilayah Libya. Sikap organisasi beranggotakan 57 negara tersebut diambil dalam pertemuan darurat di markasnya di Jeddah, Arab Saudi.

⁶ <http://www.voanews.com/indonesian/news/DK-PBB-Pertimbangkan-Zona-Larangan-Terbang-Libya-118053514.html>

Dengan bertambah parahnya krisis yang terjadi di Libya pada pertengahan februari 2011 serta bertambahnya korban sipil telah memancing reaksi presiden Amerika Serikat Barack Obama. Obama mengancam melakukan intervensi militer kepada Libya sebagai peringatan bagi Khadafi. Sebelum serangan dilancarkan, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama telah memberikan ultimatum kepada pemimpin Libya Muammar Khadafi. Obama mengancam, jika Khadafi tidak menghentikan serangan pada warga sipil, ia akan menghadapi serangan militer. Sedangkan kelompok pemberontak yang tak terlatih dan memiliki persenjataan buruk telah berjuang sejak pertengahan Februari guna mengakhiri 41 tahun kekuasaan Khadafi.

Pada tanggal 23 dan 24 Februari pasukan khusus Amerika memasuki kota Benghazi dan Tobruk. Sebelumnya Pentagon mengkonfirmasi telah mengerahkan pasukan Angkatan Laut dan Udara ke wilayah dekat Libya. Menteri Luar Negeri Hillary Clinton menegaskan pemerintah Amerika Serikat terus mempertimbangkan dan mengupayakan opsi untuk Libya.

Dan setelah resolusi PBB 1973 di sahkan pada tanggal 17 Maret 2011, Amerika pun mulai membekukan aset Libya sebesar 30 Miliar US Dollar sebagai salah satu pelaksanaan sanksi PBB. Dan untuk menegakkan zona larangan terbang di Libya, Amerika mengirim pesawat dan rudalnya ke Libya untuk membantu

kelompok pemberontak. Pada 22 April 2011 Amerika menggunakan Pesawat Predator untuk menambah pertahanan zona larangan terbang Libya.⁷

Operasi penegakan zona larangan terbang di Libya bisa menyita 300 juta dollar AS per minggu. Jika nilai tukar satu dollar AS adalah Rp 9.000, biaya yang dikeluarkan AS mencapai Rp 2,7 triliun per minggu. Tidak main-main Amerika Serikat mengeluarkan dana sebesar itu dan ini membuat banyak pihak yakin bahwa tidak mungkin AS tidak menyimpan suatu tujuan dan kepentingan terhadap resolusi yang berhasil di upayakannya.

Inggris, Amerika dan Perancis telah memblokir laut Libya untuk membatasi ruang gerak Khadafi. Blockade laut Libya perlu diletakkan di tempat khusus, tujuannya untuk menutup pasokan senjata ke Khadafi. Resolusi Dewan Keamanan PBB menegaskan bahwa blockade ini diperlukan sebagai langkah hukum dalam melakukan operasi lapangan.

Pasukan Perancis, terdiri dari pesawat Rafles dan Mirage 2000s terus berpatroli di udara Misurata, yaitu wilayah strategis bagi pertahanan Libya. Perancis juga dilaporkan telah memborbardir basis udara di pesisir Libya. Sementara itu pasukan Inggris yang terdiri dari pesawat jet Tornado dan Typhoon dilaporkan telah menyelesaikan 59 misi penghancuran di Libya. Pasukan Inggris disenjatai dengan

⁷ <http://www.tarungnews.com/fullpost/internasional/1303459330/melawan-kekuatan-khadafi-as-akan-gunakan-pesawat-predator.html>

bom anti tank dan pelacak akurasi tinggi untuk melakukan misi-misinya pada malam hari.

Selain Inggris, Perancis menjadi salah satu negara koalisi yang aktif dalam menggempur Libya dan berusaha menjatuhkan pemimpin Libya. Sejumlah pesawat jet tempur Perancis ikut menembakkan rudal salvos sejak hari pertama gempuran pasukan koalisi ke Libya. Tidak hanya itu, Perancis juga ikut mengirimkan kapal induk Charles de Gaulle ke dekat perairan Libya.

Sebagai tenaga penggerak, de Gaulle dilengkapi dua unit pembangkit yang menggunakan teknologi nuklir, PWR Type K15. Kapal ini mempunyai kecepatan 27 knot atau 50 kilometer per jam. Sejak 20 Maret 2011 de Gaulle ditempatkan di Laut Mediterania untuk mendukung serangan koalisi ke Libya. Sementara itu, pesawat jet tempur Libya pertama yang diduga melanggar zona larangan terbang diledakan oleh rudal Perancis sesaat setelah pesawat itu mendarat. Dan pasukan koalisi pun dilaporkan telah meningkatkan penyerangan ke beberapa lokasi vital.

Pada tanggal 24 Maret 2011, pesawat jet Libya tersebut dihancurkan saat mendarat disebuah basis militer. Pasukan koalisi mengatakan bahwa jet dari angkatan udara Libya itu terlacak oleh pesawat mata-mata Perancis mengudara di atas kota Misurata. Pesawat jet tempur Rafale milik militer Perancis langsung melakukan eksekusi dengan menembakkan rudal penghancur. Ini adalah pertama kalinya sebuah

jet Libya dihancurkan karena melanggar zona larangan terbang yang tercantum dalam resolusi PBB 1973.

1. Keterlibatan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO)

Pada tanggal 22 Maret, NATO menanggapi panggilan PBB dengan meluncurkan operasi untuk menegakkan embargo senjata terhadap Libya. Hari berikutnya NATO yang beroperasi di Mediterania mulai membuat yakin bahwa aliran senjata dan tentara bayaran ke Libya melewati laut telah terputus, penguasa maritime memiliki hak untuk menghentikan dan memeriksa setiap kapal yang dicurigai mereka membawa senjata atau tentara bayaran ke Libya.

Pada 23 Maret 2011, NATO telah mengambil alih operasi zona larangan terbang Libya yang bertujuan melindungi rakyat sipil dan melawan tentara Libya yang dibawah komando Khadafi. Dan pada 26 Maret 2011, NATO telah menunjuk seorang jendral bintang tiga Kanada, Letnan Jendral Charles Bouchard, untuk memimpin operasi NATO di Libya dalam upaya menegakkan zona larangan terbang dan embargo senjata yang dimandatkan PBB. Bouchard juga akan mengambil komando seluruh serangan militer guna melindungi warga sipil dari tentara yang setia pada Muammar Khadafi, ketika dan jika aliansi yang memiliki 28 anggota itu mengambil pimpinan seluruh serangan di Libya dari koalisi pimpinan Amerika Serikat.

Pada tanggal 24 Maret, NATO memutuskan untuk menegakkan mandat PBB zona larangan terbang di Libya, Resolusi PBB melarang semua penerbangan kecuali untuk tujuan kemanusiaan dan bantuan melalui wilayah udara Libya dan memastikan bahwa warga sipil dan populasi daerah tidak mengalami serangan udara.⁸

Koalisi yang diluncurkan oleh Inggris, Prancis dan AS memulai serangannya enam hari lalu, sementara beberapa anggota koalisi cemas melihat NATO menerima kepemimpinan operasi di Libya itu. Satu-satunya anggota muslim dalam NATO, Turki, enggan terlibat dalam operasi itu, sedangkan Prancis menyampaikan kekhawatiran kepemimpinan politik dari serangan itu sehingga menghalangi pengalihan komando tersebut. Setelah beberapa hari pembicaraan penuh, mereka menghasilkan perjanjian NATO akan melaksanakan zona larangan terbang dan mengekang diri untuk menyerang. Para duta besar aliansi itu diperkirakan akan bertemu lagi Minggu untuk memutuskan apakah akan mengambil pimpinan semua operasi.

Bermarkas di Komando Pasukan Gabungan Sekutu NATO di Napoli, serangan di Libya itu diberi nama sandi "Operasi Unified Protector". Di Ottawa, Menteri Pertahanan Peter Mac Kay mengatakan Kanada telah menunggu pencalonan pejabat militernya dalam operasi yang bermarkas di Napoli itu.⁹

Pada tanggal 31 Maret, NATO mengambil komando tunggal Internasional dan koalisi. Dan mengambil semua tindakan militer. Dan pada 14 April, Menteri Luar

⁸ http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_71652.htm

⁹ <http://www.antaraneews.com/berita/1301093471/jendral-kanada-pimpin-operasi-nato-ke-libya>

Negeri dari sekutu NATO dan non-NATO bertemu di Berlin, mereka berkomitmen untuk menggunakan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi operasional mandat PBB.

C. Kekecewaan Beberapa Pihak Terhadap Pelaksanaan Zona Larangan Terbang

Penyerangan pasukan Dewan Keamanan PBB yang dipimpin oleh Amerika Serikat ke Libya dikecam oleh Liga Arab. Mereka mengatakan, bukan ini yang mereka inginkan saat mendukung resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap penerapan zona larangan terbang di Libya. Senin 21 Maret 2011, Sekretaris Jenderal Liga Arab, Amir Mussa, mengatakan bahwa penyerangan tersebut bukanlah hasil yang mereka harapkan. Apa yang terjadi saat ini sangat bertentangan dengan maksud dari dukungan mereka terhadap pemberlakuan zona larangan terbang.

Dukungan dari 22 negara anggota Liga Arab terhadap pemberlakuan zona larangan terbang oleh PBB disampaikan pada 12 Maret lalu, di tengah bentrokan antara pasukan pro dan anti Muammar Khadafi di Libya. Liga Arab mengatakan bahwa Khadafi telah kehilangan legitimasinya sebagai pemimpin saat dia menyerang para demonstran.

Namun, niat baik Liga Arab yang dimaksudkan untuk melindungi warga sipil sangat berbeda dengan apa yang terjadi saat ini. Pasukan angkatan udara Amerika

Serikat, Inggris dan Prancis, melancarkan serangan membabi buta ke daratan Libya. Dilaporkan, pasukan tersebut telah menembakkan 120 rudal Tomahawk yang menewaskan 48 jiwa.¹⁰

Pada tanggal 20 Maret 2011, Cina menyatakan menyesalkan serangan-serangan udara multinasional terhadap Libya, dan mengatakan dalam pernyataan kementerian luar negeri bahwa pihaknya menentang penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional. Cina telah mencatat perkembangan-perkembangan terakhir di Libya dan menyatakan penyesalan atas serangan-serangan militer di Libya.

Rusia juga mengeluarkan pernyataan senada, di mana Moskow menyerukan gencatan secepat mungkin. Pernyataan Cina tidak menyebutkan gencatan senjata namun menegaskan, bahwa Cina menghormati kedaulatan, kemerdekaan, persatuan dan integritas wilayah negara Afrika utara itu. Yang mereka harapkan Libya bisa membenahi stabilitas secepat mungkin dan menghindari jatuhnya korban sipil selanjutnya berkaitan dengan meningkatnya konflik bersenjata tersebut. Pada 28 April 2011, Uni Afrika juga menyerukan kepada NATO agar menghentikan menargetkan pejabat Libya dalam serangan udara mereka.¹¹

Dan pada kenyataannya memang terjadi, bahwa pemberlakuan zona larangan terbang yang tersebut dalam resolusi PBB 1973 yang awalnya di tujukan untuk meminimalisir korban dan meredakan konflik justru meningkatkan instabilitas negara tersebut. Pihak-pihak yang awalnya mendukung agar diberlakukan zona larang

¹⁰<http://internasional.kompas.com/read/2011/03/24/21000741/PBB.Bukan.Pemimpin.Operasi.Militer>

¹¹<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/internasional/11/03/20/170947-cina-sesalkan-seragan-udara-multinasional-di-libya>

terbang diatas wilayah Libya merasa kecewa dengan implementasi yang ada. Mereka menuntut untuk menghentikan sanksi yang terkesan menjadi intervensi militer.

D. Pelanggaran dalam Pelaksanaan Zona Larangan Terbang

Resolusi yang didalamnya tercantum pemberlakuan zona larangan terbang di rancang dan disahkan oleh PBB dengan dukungan berbagai pihak. Di dalam 10 poin isi resolusi tersebut terdapat poin yang berhubungan dengan zona larangan terbang yaitu *“Memutuskan untuk memberlakukan larangan penerbangan di wilayah udara Arab Libya Jamahiriya untuk melindungi penduduk sipil. Namun pesawat kemanusiaan dan pesawat PBB, serta Liga Arab dikecualikan.”* Dalam poin tersebut cukup jelas bahwa PBB hanya memberikan izin penerbangan bagi pesawat kemanusiaan saja yang diperbolehkan untuk melintasi wilayah Libya melalui udara.¹²

Tujuannya sudah sangat jelas bahwa agar tidak ada pihak yang menggunakan kekuatan militer udara dalam konflik yang terjadi antara pemerintah dan demonstran. Alasan usulan koalisi untuk mengajukan zona larangan terbang pada awalnya yaitu atas tindakan pemerintah Khadafi yang melawan para demonstran dengan menggunakan kekuatan militer udara dan darat. Sehingga resolusi tersebut di sepakati dengan pertimbangan meredakan konflik horizontal di Libya.

¹² Agung DH, Khadafi: anjing gila dari sahara, Narasi, Yogyakarta 2011 hal.96

Namun pada kenyataannya setelah PBB mengesahkan resolusi tersebut tidak lama setelah itu negara koalisi melakukan penerbangan diatas wilayah Libya dengan menjatuhkan rudal diatas pangkalan udara Libya. Jelas bahwa pesawat tersebut tidak melakukan misi kemanusiaan tapi justru merusak dan menyerang negara yang sedang berkonflik. Pesawat- pesawat koalisi sengaja mengincar pertahanan Khadafi untuk mendesak pemimpin Libya tersebut untuk bersedia mundur dari kuasanya. Padahal dalam mandat dan resolusi PBB tidak tercantum di perbolehkannya intervensi politik yang terjadi di negara tersebut.

Selain itu, Amerika dan NATO jelas terlihat pada kubu pemberontak untuk memerangi pemerintah Khadafi dan memberikan bantuan kepada pemberontak untuk memukul maju perlawanan. Di beritakan bahwa pada 6 April 2011 terdapat seorang utusan Amerika Serikat tiba di Benghazi untuk menemui para pemberontak dan menawarkan bantuan keuangan terhadap mereka. Dengan memihak atau membantu salah satu pihak berarti koalisi dan NATO telah menyalahgunakan tujuan pemberlakuan resolusi ini. Karena yang terjadi justru ke dua belah kubu merasa semakin mendapat kobaran api untuk semakin melawan satu sama lainnya.¹³

Pada intinya, tindakan para koalisi dan NATO lebih pada misi pribadi dan berbagai kepentingan. Karena dengan terbang diatas wilayah Libya dan menjatuhkan bom di wilayah pertahanan loyalis dan Khadafi telah mengakibatkan meningkatnya kerugian dan kerusakan di Libya. Bukan lagi misi kemanusiaan tetapi malah

¹³ *Ibid*, hal. 100-101

bertambah banyaknya korban sipil yang tewas dan terluka akibat dari tindakan koalisi dan NATO. Maka sangat wajar apabila timbul reaksi dari berbagai pihak baik yang awalnya mendukung ataupun menentang resolusi tersebut. Mereka mengecam dan menuntut di hentikannya segera keterlibatan negara sekutu dan NATO dalam aksi militer yang tidak seharusnya mereka lakukan. Karena fungsi mereka seharusnya hanyalah menegakkan larangan terbang untuk kedua pihak yang berkonflik agar tidak melakukan serangan militer udara.